

KRITIK SOSIAL MANIPULASI HUKUM DALAM NOVEL *TERUSLAH BODOH JANGAN PINTAR* KARYA TERE LIYE: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA

Santi Septiani^{1*}, David Setiadi², Asep Firdaus³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Alamat Korespondensi: Jl. R Syamsudin, SH. No. 50 Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

*Email Korespondensi: septianisanti91@ummi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kritik sosial praktik manipulasi hukum dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye melalui kajian sosiologi sastra. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye, sedangkan data penelitian berupa kutipan narasi, dialog, dan peristiwa yang berkaitan dengan praktik manipulasi hukum. Data dikumpulkan melalui teknik baca dan catat, kemudian dianalisis menggunakan aspek sosiologi sastra yang meliputi konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan zaman, dan fungsi sosial sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan di bidang ekonomi serta pandangan sosial Tere Liye memengaruhi penggambaran persoalan ketimpangan ekonomi, perpajakan, konflik agraria, dan aktivitas pertambangan dalam novel. Sebagai cerminan zaman, novel merepresentasikan berbagai realitas sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat, seperti perampasan wilayah masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hubungan antara elite politik dan pemilik modal, serta dinamika pemerintahan. Sementara itu, fungsi sosial sastra diwujudkan melalui kritikan terhadap praktik manipulasi hukum yang meliputi pemelintiran fakta, hukum sebagai alat legitimasi, pengaburan proses hukum, kriminalisasi korban, dan kolusi antarlembaga. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi sastra dengan menunjukkan bahwa karya sastra tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai media kritik terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan hukum, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.

Kata Kunci: kritik sosial, manipulasi hukum, novel, sosiologi sastra, Tere Liye

ABSTRACT

This study aims to describe the representation of social criticism of legal manipulation practices in Tere Liye's novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar through a sociology of literature approach. This research employed a descriptive qualitative method with the novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar as the primary data source. The data consisted of narrative passages, dialogues, and events related to legal manipulation practices represented in the text. Data were collected through reading and note-taking techniques and analysed using the sociological literary framework proposed by Damono, which includes the author's social context, literature as a reflection of its era, and the social function of literature. The findings reveal that Tere Liye's social background and perspectives influence his depiction of economic inequality, taxation issues, agrarian conflicts, and mining activities. As a reflection of contemporary social realities, the novel portrays land dispossession, environmental degradation, the relationship between political elites and business actors, and various political dynamics in Indonesia. Furthermore, the social function of literature is manifested through criticism of legal manipulation practices, including fact distortion, the use of law as a tool of legitimacy, the obscuring of legal processes, the criminalisation of victims and marginalised groups, and collusion among institutions. Through these representations, the novel functions as a medium of social criticism towards the interaction between law, political power, and economic interests in society.

Keywords: social criticism, legal manipulation, novel, sociology of literature, Tere Liye

PENDAHULUAN

Karya sastra pada hakikatnya lahir dari pergulatan pengarang terhadap realitas sosial yang ada di sekitarnya. Berbagai peristiwa, pengalaman, dan dinamika sosial di masyarakat kerap menjadi sumber inspirasi bagi pengarang. Sebagai produk budaya, karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media untuk merepresentasikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Wallek dan Warren sebagaimana diungkapkan oleh Abdillah dkk. (2025), sastra memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat karena pengarang merupakan bagian dari lingkungan sosial yang turut memengaruhi penciptaan karya sastra. Oleh sebab itu, karya sastra sering kali memuat berbagai persoalan sosial yang berkembang pada zamannya dan menjadi sarana bagi pengarang untuk menyampaikan pandangan atau tanggapannya terhadap realitas sosial. Salah satu bentuk karya sastra yang dekat dengan realitas sosial dan digunakan untuk merepresentasikan kehidupan sosial adalah novel.

Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa yang menyajikan gambaran kehidupan manusia melalui berbagai peristiwa, tokoh, dan latar yang dibangun secara kompleks. Menurut Wulandari dkk. (2024) novel merupakan produk yang lahir dari penggarapan berbagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dituliskan oleh pengarang melalui bentuk narasi. Selain menyajikan persoalan sosial, novel juga memuat rangkaian kata yang memiliki makna mendalam serta pesan tersirat bagi pembaca. Novel juga berfungsi merepresentasikan dinamika sosial, termasuk ketidakadilan struktural dan praktik penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana secara konsisten ditampilkan dalam tema yang diangkat dalam beberapa karya Tere Liye, salah satunya novel berjudul *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*.

Novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* terbit pada tahun 2024 mengisahkan perjuangan kelompok aktivis lingkungan dalam menghadapi perusahaan tambang besar yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat dalam novel. Konflik yang dibangun dalam novel tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga memperlihatkan relasi antara korporasi, elite politik, aparat negara, serta proses penegakan hukum yang sarat dengan sebuah kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Persoalan yang dibahas dalam novel memiliki kedekatan dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik agraria, perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, serta hubungan antara elite politik dan pemilik modal merupakan persoalan yang kerap menjadi perhatian publik. Sementara itu, berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga menunjukkan bahwa persoalan hubungan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Secara tekstual, novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* menampilkan kompleksitas persoalan sosial yang direpresentasikan melalui struktur cerita dan hubungan antartokoh. Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk menjadikan novel ini sebagai objek penelitian dan dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Menurut Damono sebagaimana diungkapkan Aryanti dkk. (2025) karya sastra merupakan bagian dari struktur sosial yang dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu konteks sosial pengarang, karya sastra sebagai cerminan zaman dan fungsi sosial sastra. Berdasarkan kerangka tersebut, teks dipahami sebagai kritik sosial terhadap kondisi sosial-politik Indonesia yang menjadi latar belakang proses kreatif pengarang. Sementara itu, untuk memperdalam analisis, peneliti memanfaatkan pemahaman mengenai praktik hukum sebagai pengetahuan pendukung dalam menginterpretasikan bentuk-bentuk manipulasi hukum yang direpresentasikan dalam teks novel. Ada pun dalam penelitian ini, bentuk-bentuk praktik manipulasi hukum dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan hukum yang

meliputi pemelintiran fakta, hukum sebagai alat legitimasi, pengaburan proses hukum, kriminalisasi korban atau pihak lemah serta kolusi antarlembaga. Kategorisasi tersebut digunakan sebagai pengetahuan pendukung untuk memperjelas kritik sosial yang direpresentasikan dalam teks novel.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji teks sastra tentang fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum telah dilakukan oleh Waluyo (2014) penelitiannya berjudul *Kritik Sosial terhadap Sistem Hukum dalam Novel Bukan Karena Kau Karya Toha Mohtar: Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa karya sastra dapat menjadi media kritik terhadap sistem hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Penelitian lain dilakukan oleh Sinubu dkk. (2022), dengan judul *Analisis Struktural Genetik Pada Novel Rogue Lawyer Karya John Grisham: Analisis Sosiologi Sastra*, menunjukkan bahwa karya sastra mampu merepresentasikan ketimpangan sosial dan permainan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, penelitian terhadap novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye telah dilakukan oleh Hasmiati (2025), dengan judul *Ekokritik dan Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar Karya Tere Liye*, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa novel ini memuat lima nilai pendidikan yakni nilai pendidikan ketuhanan, kesusilaan, keindahan, kemasyarakatan, dan kecerdasan yang terintegrasi melalui pengalaman tokoh-tokoh dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dalam novel. Adapun penelitian lain dilakukan oleh Prasetyo dkk. (2025) dengan judul *Representasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar Karya Tere Liye*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa novel ini menggambarkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme melalui perilaku tokoh dalam novel yang mencerminkan rusaknya moralitas dan penyimpangan hukum yang mengarah pada ketidakadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kritik sosial praktik manipulasi hukum dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang meliputi konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan zaman, dan fungsi sosial sastra. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memperkaya kajian sosiologi sastra, khususnya yang berkaitan dengan representasi praktik manipulasi hukum dalam karya sastra Indonesia kontemporer, sekaligus untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan karya sastra dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan karena rencana penelitian ini difokuskan pada pemaknaan, interpretasi dan pendalaman terhadap fenomena sosial yang direpresentasikan dalam teks sastra. Menurut Sugiyono sebagaimana dijelaskan Wulandari (2024), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci yang berupaya memahami segala peristiwa secara mendalam. Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Moloeng sebagaimana dikutip oleh Wulandari (2025) yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggali fenomena secara menyeluruh sehingga menghasilkan data yang kaya dan penuh makna.

Selanjutnya, Moloeng sebagaimana dikutip oleh Andriana dan Manaf (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu (1) berangkat dari latar alamiah, (2) manusia sebagai instrumen utama (3) bersifat deskriptif, (4) analisis data yang dilakukan secara induktif, dan (5) lebih menekankan proses daripada hasil. Dengan demikian, karakteristik tersebut relevan dengan penelitian sastra, sebab analisis novel memerlukan proses interpretasi mendalam terhadap struktur teks, konteks sosial yang direfleksikan melalui tokoh latar, dan peristiwa yang ada dalam cerita.

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye. Data penelitian berupa kutipan narasi, dialog, dan peristiwa yang berkaitan dengan kritik sosial praktik manipulasi hukum dalam novel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik baca dan catat. Puspasari dkk. (2023) menjelaskan bahwa teknik baca catat merupakan langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengungkap permasalahan yang terdapat dalam bacaan. Peneliti membaca novel secara intensif dan berulang untuk memahami isi cerita secara menyeluruh, kemudian mencatat bagian-bagian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan aspek sosiologi sastra yang meliputi konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan zaman, dan fungsi sosial sastra. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye, ditemukan bahwa kritik sosial praktik manipulasi hukum direpresentasikan melalui tiga aspek sosiologi sastra. Ketiga aspek tersebut yaitu konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan zaman, dan fungsi sosial sastra. Adapun hasil penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan ketiga aspek tersebut sebagai bentuk representasi kritik sosial dalam novel.

1. Konteks Sosial Pengarang

Konteks sosial pengarang berkaitan dengan latar belakang sosial, pengalaman, pandangan, serta kondisi masyarakat yang memengaruhi pengarang dalam menciptakan karya sastra. Hubungan antara pengarang dan pengalamannya menjadi aspek penting sebab dapat memengaruhi bentuk maupun karya sastra yang dihasilkan. Novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* menghadirkan kisah tentang praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemilik kekuasaan serta memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Sebagai seorang penulis yang memiliki latar belakang ekonomi, Tere Liye menunjukkan pemahaman mengenai persoalan ekonomi, perpajakan dan industri pertambangan. Pemahaman tersebut tercermin dalam narasi yang membahas ketimpangan ekonomi dan kebijakan perpajakan pada sektor pertambangan, hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

“Yang Mulia, sejak dulu industri tambang ini selalu bombastis dengan angka-angka.” Aktivis berseru lantang, “Sekian ratus triliun kenaikan ekspor, sekian miliar dolar pembayaran pajak, tapi sesungguhnya, secara persentase atas omzet, kontribusi industri ini rendah. Rata-rata royalti tambang hanya menyeter 5%, royalti smelter rata-rata hanya 2,5%, bandingkan dengan PPN 11% barang dan jasa lain. Bahkan hasil olahan smelter tertentu pernah 0%, tidak membayar apa pun. Lebih tragis lagi, industri ini banyak yang mendapatkan tax holiday. Pembebasan pajak. Ada yang 7 tahun, 10 tahun, bahkan smelter milik PT Semesta Minerals & Mining mendapatkan tax holiday 20 tahun” (Liye, 2024: 322-323).

Berdasarkan dialog aktivis lingkungan tersebut, peneliti berargumen bahwa Tere Liye menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan ekonomi dan perpajakan di sektor pertambangan yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan kewajiban pajak masyarakat biasa. Keprihatinan tersebut berkaitan dengan pandangan Tere Liye mengenai persoalan tingginya pajak di Indonesia terhadap penulis buku. Hal tersebut sejalan dengan media daring DDTC News (2017), memuat tentang pernyataan Tere Liye terkait keputusannya untuk berhenti menerbitkan buku dalam bentuk cetak. Oleh sebab itu, persoalan ketimpangan ekonomi antara korporasi besar dan masyarakat kecil

menjadi salah satu perhatian yang dihadirkan dalam novel. Pandangan tersebut diperkuat melalui kutipan yang menunjukkan adanya perbandingan kontribusi pajak antara pelaku usaha kecil dengan perusahaan tambang raksasa berikut.

"...Maka, berapa pembayaran pajak Bapak Agus ke negara? 11% dari PPN omzet, itu berarti 11 sendiri. Dan 22% PPh dari keuntungan, itu berarti nilainya 4,4, sebesar 15,4, atau setara 15,4% dari omzet Bapak Agus...Tambang emas tarif royaltinya sebesar 3,75%-10% progresif sesuai harga emas dunia. Secara rata-rata, ada di 5%. Artinya, royaltinya 5 dari total omzet 100. Ditambah 22% PPh dari keuntungan, atau senilai 4,4, maka total semuanya yang disetor ke negara sebesar 5 ditambah 4,4, totalnya 9,4 atau setara 9,4%. "15,4% versus 9,4%, menurut Saudara Liem, siapa yang berkontribusi lebih banyak?" (Liye, 2024: 321-322).

Berdasarkan kutipan di atas, melalui tokoh aktivis lingkungan, peneliti berpendapat, Tere Liye memperlihatkan adanya ketimpangan kontribusi pajak antara pelaku usaha kecil dan perusahaan tambang besar. Perbandingan yang digunakan menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil justru membayar persentase pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan tambang yang memperoleh keuntungan lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, perbandingan yang Tere Liye hadirkan dalam kutipan novel digunakan untuk memberikan sindiran terhadap kebijakan perpajakan yang dinilai kurang adil dan lebih menguntungkan pihak pengusaha besar.

Keprihatinan tersebut berkaitan dengan pandangan Tere Liye mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai penulis, Tere Liye pernah menyuarakan keluhannya terhadap nilai pajak yang dibebankan kepada penulis buku yang terlalu tinggi. Bahkan, Tere Liye sempat mengumumkan tentang penghentian penerbitan dan pencetakan ulang beberapa karyanya. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti berargumen bahwa pengalaman dan pandangan Tere Liye memengaruhi caranya menghadirkan sindiran mengenai ketimpangan pajak sebagaimana yang terdapat dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*.

2. Sastra Sebagai Cerminan Zaman

Sastra sebagai cerminan zaman menunjukkan bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga untuk merepresentasikan kehidupan pada masa tertentu. Fenomena berbagai realitas sosial, politik, budaya, maupun fenomena lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan zamannya dapat digambarkan melalui karya sastra oleh pengarang. Sementara itu, karya sastra juga dapat berperan sebagai media yang dapat menumbuhkan kesadaran pembaca terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam pandangan Wallek dan Warren sebagaimana dikutip oleh Fitrianingrum (2016), karya sastra dianggap sebagai hasil interaksi antara pengarang dan lingkungannya, sehingga dalam teks sastra terkandung cerminan nilai-nilai sosial, budaya dan moral yang berkembang di masyarakat.

Tere Liye dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* menggambarkan kisah mengenai praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ia menghadirkan berbagai persoalan sosial yang sering kali terjadi di Indonesia, seperti pembebasan lahan kampung adat secara paksa, perampasan tanah masyarakat, kerusakan lingkungan, dan kedekatan antara pemilik kekuasaan dan korporasi besar. Hal tersebut sejalan dengan informasi yang dimuat dalam media daring *Indonesiana by Tempo* (2023), yang memuat pembahasan tentang keberadaan industri tambang yang sering kali menimbulkan penderitaan bagi masyarakat lokal sebab hilangnya ruang hidup, ketidakadilan sosial, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tere Liye menggambarkan persoalan

tersebut dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, bagaimana masyarakat dalam novel dipaksa meninggalkan tanah yang telah mereka tempati selama ratusan tahun. Hal tersebut dapat terlihat pada kutipan berikut.

"Ini pulau kami, Pak!" Siti berseru ketus, "Ratusan tahun negara kemana saja? Jika negara merasa memiliki tanah itu, kalian kemana saja? Datang tidak pernah, mendadak memberikan tanah itu kepada orang lain! Atau kalian telah disuap oleh perusahaan itu?" (Liye, 2024: 104).

Berdasarkan kutipan di atas, peneliti berargumen bahwa Tere Liye menyampaikan tanggapan berupa sindiran terhadap sikap negara yang dinilai abai terhadap keberadaan masyarakat adat atau rakyat kecil ketika akan memberikan izin kepada pihak lain mengenai pemanfaatan wilayah pemukiman. Melalui tokoh Siti, pengarang menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat adat dalam novel ketika hak mereka atas tanah yang telah ditempati secara turun temurun dipertanyakan. Sementara itu, kutipan tersebut juga menunjukkan sindiran terhadap adanya kemungkinan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan adanya kedekatan antara pemilik kekuasaan dan pemilik modal. Persoalan mengenai adanya indikasi kedekatan antara pemilik kekuasaan dan pemilik modal dapat terlihat dalam kutipan berikut.

"Saya tidak bisa mencegah jika pengusaha-pengusaha membantu perjuangan kami membangun negara maju. Mereka tentu boleh ikut membantu misi dan visi kami menyejahterakan rakyat". (Liye, 2024: 65).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan adanya indikasi hubungan erat antara kekuasaan politik dan pengusaha besar dalam proses pembangunan negara. Penggambaran tersebut memiliki kemiripan dengan informasi yang dimuat pada media daring CNBC Indonesia (2024), memuat tentang pembahasan sejumlah pengusaha dan pemilik perusahaan besar yang diperkirakan berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi setelah terpilihnya presiden baru yang telah didukung, terutama melalui proyek pembangunan, industri pertambangan, energi dan infrastruktur. Melalui pernyataan tokoh calon presiden yang dihadirkan oleh Tere Liye dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, menggambarkan adanya hubungan erat antara pengusaha dan kekuasaan politik. Dukungan pengusaha terhadap kekuasaan ditampilkan sebagai yang wajar dalam pembangunan negara. Namun, di sisi lain, Tere Liye juga menunjukkan bahwa hubungan tersebut berpotensi melahirkan kebijakan yang akan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Selain menggambarkan kedekatan antara pemilik kekuasaan dan pemilik modal. Tere Liye juga menghadirkan persoalan tentang keberlanjutan program pemerintahan setelah pengantian presiden. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

Pelantikan Presiden terpilih. "Bagaimana dengan program seratus harinya, Pak?" Wartawan mengerubuti depan pintu. "Nanti segera diumumkan. Intinya melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Program-program agar masyarakat menjadi sejahtera, adil, makmur." Presiden terpilih tersenyum lebar (Liye, 2024: 220).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan bagaimana pergantian presiden biasanya akan tetap melanjutkan program pemerintahan sebelumnya dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Melalui pernyataan tokoh presiden terpilih tersebut, Tere Liye menunjukkan bahwa janji untuk melanjutkan program pemerintahan selanjutnya adalah bagian dari strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, Tere Liye pun memberikan pandangan tersirat bahwa dengan

pergantian presiden baru tersebut, belum tentu akan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan yang telah berjalan pada kepemimpinan presiden sebelumnya. Persoalan politik juga terlihat dari gambaran Tere Liye mengenai dinamika penyusunan kabinet pemerintahan yang menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan profesionalitas pejabat, kepentingan politik, dan janji-janji pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

Satu minggu kemudian. Setelah pelantikan kabinet baru. "Beberapa pengamat mengkritisi komposisi menteri, Pak. Menilai jika janji kabinet profesional tidak terpenuhi, hampir 50% menteri dari partai politik."

"Memangnya jika dari partai politik tidak profesional? Ini sudah dipilih hati-hati yang paling bagus. Jangan keliru menyimpulkannya."

"Pengamat juga mengkritisi kabinet yang janjinya ramping, ternyata justru bertambah" (Liye, 2024: 221)

Melalui dialog antara wartawan dan presiden terpilih tersebut, Tere Liye menggambarkan bahwa kabinet yang terbentuk sering menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas menteri, terutama ketika jabatan kabinet banyak diisi oleh tokoh-tokoh dalam partai politik. Sementara itu, Tere Liye juga menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas pemerintahan, terlihat dari janji kabinet yang ramping, akan tetapi justru mengalami penambahan jumlah dalam kementerian.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti berargumen bahwa melalui novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, Tere Liye menggambarkan realitas sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Persoalan seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, hubungan antara elite politik dan pengusaha, keberlanjutan program pemerintahan, serta dinamika pembentukan kabinet tersebut, menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi media yang merepresentasikan kondisi sosial politik pada zamannya.

3. Fungsi Sosial Sastra

Fungsi sosial sastra berkaitan dengan peran karya sastra yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Fungsi karya sastra sebagai hiburan serta sebagai media edukatif bagi pembacanya. Dengan menciptakan karya sastra, pengarang dapat menyampaikan nilai moral, membentuk identitas sosial, serta menghadirkan tanggapan terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tanggapan tersebut dapat berupa sindiran, penilaian, serta kritik sosial terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan nilai norma dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kritik sosial dalam karya sastra merupakan bentuk pemikiran pengarang dalam menanggapi beragam persoalan sosial yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku, sehingga diwujudkan dalam bentuk karya sastra yang diciptakan oleh pengarang.

Adapun dalam penelitian ini, fungsi sosial sastra dipahami sebagai kemampuan karya sastra untuk merepresentasikan kritik sosial terhadap praktik manipulasi hukum yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengidentifikasi bentuk kritik sosial yang berkaitan dengan praktik manipulasi hukum dalam novel, peneliti menggunakan pemahaman mengenai praktik manipulasi hukum sebagai pengetahuan pendukung. Berdasarkan hasil analisis, kritik sosial tersebut direpresentasikan melalui lima bentuk, yaitu pemelintiran

fakta, hukum sebagai alat legitimasi, pengaburan proses hukum, kriminalisasi korban atau pihak lemah, serta kolusi antar lembaga.

a. Pemelintiran Fakta

Pemelintiran fakta dipahami sebagai tindakan mengubah, menyembunyikan, atau membelokkan fakta atas dasar kepentingan tertentu. Dalam konteks sosial yang berkaitan dengan hukum, praktik tersebut pada umumnya dilakukan untuk memengaruhi proses pembuktian, menggiring opini publik, atau untuk melindungi pihak tertentu dari tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Bentuk kritik terhadap praktik tersebut digambarkan oleh Tere Liye melalui dialog persidangan antara aktivis lingkungan dan Hotma Cornelius. Sebagaimana dapat terlihat dalam kutipan berikut.

"Mana buktinya?

Tunjukkan selembarnya kertas dokumen kepemilikan—"

"Karena itu ilegal, tidak ada dokumennya—"

"Nah, penggugat telah menjawabnya sendiri." Hotma Cornelius tersenyum sinis...

"Aku turut berduka cita atas kematian Badrun di lubang bekas tambang. Tapi itu bukan di tambang milik PT Semesta Minerals & Mining. Bukan di tambang keluarga, orang tua, kakek Tuan Liem. Itu tambang rakyat ilegal, dan itu bukan urusan klienku... Pihak penggugat mendramatisir seolah lubang-lubang itu mesin pembunuh" (Liye, 2024: 46 dan 48).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan upaya pengalihan fokus persoalan yang dilakukan oleh tokoh Hotma Cornelius dalam persidangan. Alih-alih membahas dampak keberadaan lubang bekas tambang yang menyebabkan kematian Badrun, perhatian diarahkan pada status tambang yang dianggap ilegal dan menurut Hotma Cornelius bukan milik kliennya. Selain itu, tokoh Hotma Cornelius juga mencoba membangun opini bahwa penggugat tidak perlu berlebihan terkait penilaian tentang lubang bekas tambang dapat mengancam nyawa. Penggambaran tersebut menunjukkan kritik Tere Liye terhadap kerapnya pemelintiran fakta dalam proses hukum. Sementara itu, pemelintiran fakta juga terlihat ketika Hotma Cornelius berusaha menyangkal terkait tuduhan pencemaran merkuri dari aktivitas tambang milik PT Semesta Minerals and Mining yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat dalam novel. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

...anak-anak yang mendadak sakit, tremor, kejang-kejang, sakit saraf, karena merkuri. Pun bayi-bayi lahir cacat, usus di luar perut, otak di luar tempurung kepala, karena merkuri.

"Tapi tuduhan itu tidak berdasar. Sejak tahun 1960-an, tidak ada lagi tambang emas skala besar yang menggunakan merkuri, karena itu merugikan perusahaan, pemisahan emas tidak efisien. Teknologi tambang telah berubah, menggunakan zat kimia lain yang lebih aman. Klienku tidak menggunakan merkuri. Pun limbah tambang, tailing, tidak mengandung zat kimia berbahaya" (Liye, 2024: 132).

Berdasarkan kutipan di atas, melalui tokoh Hotma Cornelius, Tere Liye menggambarkan adanya pertentangan antara kondisi masyarakat yang mengalami dampak

pencemaran aktivitas tambang dengan pernyataan pihak perusahaan yang menolak tentang tuduhan tersebut. Penolakan tersebut dibangun melalui penggunaan argumentasi ilmiah yang bertujuan untuk memperkuat citra perusahaan sebagai pihak yang tidak bersalah. Melalui penggambaran tersebut, Tere Liye menyampaikan kritik terhadap praktik penutupan fakta pencemaran lingkungan yang dilakukan pihak perusahaan. Dengan demikian, kasus pemelintiran fakta dalam novel ini sebagai representasi kritik terhadap berbagai upaya manipulasi yang dapat menghambat terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Persoalan ini terdapat kemiripan dengan berita yang dimuat dalam media daring Liputan6 (2019), memuat informasi tentang dampak kronis pencemaran merkuri terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa merkuri memiliki dampak serius bagi kesehatan, di antaranya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan berbagai macam penyakit, dan dapat meningkatkan risiko kematian.

b. Hukum Sebagai Alat Legitimasi

Hukum sebagai alat legitimasi merujuk pada sebuah penggunaan hukum untuk membenarkan, melindungi, dan memperkuat pihak tertentu yang memiliki kekuasaan politik maupun kekuatan ekonomi. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sepenuhnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, melainkan dimanfaatkan untuk memberikan pembenaran terhadap sebuah tindakan yang akan menguntungkan kelompok atau pihak tertentu. Menurut Luthan (2007), hukum dapat berfungsi sebagai sarana legalisasi kekuasaan formal sehingga pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi mampu memanfaatkan hukum untuk mempertahankan kepentingannya.

Bentuk kritik terhadap praktik tersebut digambarkan Tere Liye melalui argumentasi tokoh Hotma Cornelius dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*. Tokoh Hotma dalam persidangan membela penguasaan wilayah untuk yang telah lama ditempati oleh masyarakat adat dalam novel untuk diambil alih oleh perusahaan tambang, sebab negara berhak mengambil wilayah tersebut dan menyerahkannya kepada pihak lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

"...Negara memiliki hak atas seluruh tanah, dan negara berhak memberikannya ke orang per orang, dan atau organisasi, dan atau perusahaan yang ditunjuk, agar bisa dimanfaatkan, diolah sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat...""Saat klienku mendapatkan konsesi itu, maka secara hukum mereka memilikinya secara legal dan sah. Justru pertanyaannya, apakah penduduk pulau itu juga menguasai tanah di pesisir dengan legal dan sah?" (Liye, 2024: 127).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan bagaimana legalitas hukum digunakan untuk membenarkan penguasaan wilayah oleh perusahaan tambang. Tokoh Hotma Cornelius menempatkan konsesi yang diberikan negara sebagai dasar utama untuk menegaskan keabsahan kepemilikan perusahaan atas tanah yang menjadi objek sengketa. Sebaliknya, keberadaan masyarakat adat dalam novel yang telah menempati dan memanfaatkan wilayah tersebut secara turun temurun justru dipersoalkan legalitasnya. Dengan demikian, perhatian tidak lagi diarahkan pada dampak sosial yang dialami

masyarakat, melainkan pada aspek formal yang menguntungkan pihak perusahaan tambang.

Tere Liye juga memperlihatkan bahwa istilah demi kesejahteraan rakyat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pembenaran terhadap penguasaan wilayah oleh korporasi. Dalam novel, alasan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dikemukakan untuk mendukung keberadaan perusahaan tersebut. Namun, pada saat yang sama masyarakat justru dihadapkan pada ancaman kehilangan lahan untuk tempat tinggal dan sumber penghidupan yang sudah mereka miliki. Persoalan tersebut selaras dengan informasi yang dimuat dalam media daring Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2021), membahas terkait ancaman perampasan wilayah adat akibat pemberian izin dan konsesi negara kepada perusahaan melalui regulasi investasi dan pertambangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti berargumen bahwa Tere Liye menghadirkan kritik sosial terhadap pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan korporasi. Kritik tersebut ditujukan pada kondisi ketika hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembenaran terhadap penguasaan wilayah atas nama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tidak dijadikan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak masyarakat itu sendiri.

c. Pengaburan Proses Hukum

Pengaburan proses hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan, menghambat, atau mempersulit jalannya proses hukum sehingga pokok persoalan yang sebenarnya menjadi tidak jelas. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rekayasa kesaksian, penghilangan barang bukti, pembungkaman saksi, dan penggunaan strategi tertentu untuk memengaruhi jalannya persidangan. Dalam konteks ini, pengaburan proses hukum pada umumnya dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi untuk mempertahankan kepentingannya agar terhindar dari tanggung jawab hukum.

Praktik pengaburan proses hukum digambarkan oleh Tere Liye dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, melalui tokoh Mukti yang menjadi saksi di persidangan berkaitan dengan kasus kematian sahabatnya, Badrun. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

"...Semakin berusaha dilupakan, aku semakin mengingat saat tangan Ahmad memukul kepala Badrun."

"Lantas kenapa sekarang saudara baru bilang?"

"Karena.... Karena aku ingin kebenaran ini dibuka."

Hotma Cornelius mengepalkan tinju. Jawaban yang sempurna—sesuai latihan yang dia berikan (Liye, 2024: 55).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan adanya rekayasa kesaksian dalam proses persidangan. Pengakuan Mukti yang tampak meyakinkan ternyata telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya oleh Hotma Cornelius. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesaksian yang seharusnya menjadi sarana untuk mengungkap sebuah fakta, dalam hal ini justru digunakan sebagai alat untuk membangun narasi yang hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, proses persidangan tidak lagi berorientasi pada

pencarian fakta, melainkan untuk memenangkan perkara dan melindungi kepentingan korporasi besar.

Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa proses hukum dapat dimanipulasi melalui kesaksian yang telah direkayasa. Dalam kondisi demikian, kebenaran tidak dapat ditentukan oleh sebuah fakta yang telah terjadi, melainkan dapat dikendalikan oleh sebuah informasi palsu dalam persidangan. Melalui tokoh Hotma Cornelius, Tere liye menunjukkan bagaimana hukum dapat kehilangan fungsi idealnya ketika proses pembuktian telah dipengaruhi oleh sebuah kepentingan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi. Sementara itu, selain dengan melakukan rekayasa kesaksian dalam persidangan, pengaburan proses hukum juga digambarkan oleh Tere Liye dalam novel melalui tindakan pembungkaman saksi dan upaya penghilangan barang bukti yang berpotensi mengungkap kebenaran. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

Sebuah truk besar meluncur dari sisi kiri, menghantam mobil, persis di bagian tempat saksi duduk...Yang parah adalah saksi mereka. Terjepit dalam mobil yang ringsek...

"Tas itu...amankan tas itu." Saksi berkata pelan—di tengah sisa kesadarannya...Tas itu berisi bukti-bukti, foto-foto, surat menyurat, daftar lengkap, yang telah disiapkan saksi untuk melawan Mayor Bacok...Pemilik warung segera berlarian hendak mengambil tas itu. Terlambat. Dua motor gagah lebih dulu meluncur ke titik kecelakaan...Dua orang yang duduk di belakang lompat turun, mengambil tas itu lebih dulu...Itu jelas bukan kecelakaan biasa. Lawan telah menebak dengan akurat, lantas mengambil tindakan serius untuk menyempal saksi serta menghilangkan semua bukti.

Percuma berharap kecelakaan itu akan diselidiki hingga tuntas. Aparat hanya menganggapnya kecelakaan biasa (Liye, 2024: 294 dan 297).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan bahwa upaya pengungkapan kebenaran dapat dihambat melalui tindakan yang sudah terencana secara terstruktur. Kecelakaan yang menimpa saksi yang akan dihadirkan oleh penggugat dalam novel tidak ditampilkan sebagai peristiwa kecelakaan biasa, melainkan sebagai bagian dari upaya dari pihak tergugat dalam mencegah terungkapnya informasi penting yang dapat merugikan kepentingan mereka. Hal tersebut terlihat dari posisi saksi yang menjadi korban utama dalam kecelakaan tersebut, serta aksi adanya dua orang misterius yang dengan segera mengambil tas berisi dokumen dan berbagai bukti penting sebelum berhasil diamankan.

Penggambaran adanya tas yang berisi foto, surat-menyurat dan daftar lengkap mengenai keterlibatan tokoh Mayor Bacok tersebut sangat penting, sebab dapat menunjukkan bahwa saksi yang sengaja dibuat celaka itu memiliki informasi penting yang berpotensi mengungkap keterlibatannya tersebut. Dalam konteks tersebut, kecelakaan yang digambarkan Tere Liye dalam novel, dapat dipahami sebagai tindakan yang disengaja untuk membungkam saksi sekaligus menghilangkan barang bukti. Apabila informasi dan bukti yang dimiliki saksi berhasil sampai di persidangan, maka fakta mengenai keterlibatan Mayor Bacok dalam melindungi pihak korporasi tambang raksasa itu berpotensi terungkap. Kondisi tersebut dapat memperlemah posisi pihak tergugat sekaligus dapat membuka jaringan kepentingan yang melibatkan aparat keamanan dan pihak korporasi. Oleh sebab itu, tindakan menghilangkan saksi dan barang bukti menjadi cara licik pihak tergugat untuk mencegah terungkapnya fakta penting tersebut. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa Tere Liye menghadirkan kritik terhadap adanya praktik pengaburan proses hukum melalui dengan sengaja membuat sebuah peristiwa seolah terjadi kecelakaan, padahal tindakan tersebut adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pihak tergugat dalam novel agar sebuah fakta penting tidak terungkap.

d. Kriminalisasi Korban

Kriminalisasi korban atau pihak lemah didefinisikan sebagai tindakan yang menjadikan individu atau kelompok yang sebetulnya berada pada posisi yang dirugikan justru dianggap sebagai pihak yang dianggap bersalah melalui penggunaan instrumen hukum. Praktik tersebut pada umumnya dilakukan dengan memberikan tuduhan, pelabelan negatif, atau sebuah proses hukum tertentu kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks ini, hukum tidak digunakan untuk melindungi pihak korban, melainkan digunakan untuk melemahkan perlawanan terhadap kepentingan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Menurut Herwati (2019), mengungkapkan bahwa kriminalisasi sering terjadi terhadap masyarakat adat dan pejuang agraria yang memperjuangkan hak atas tanah maupun ruang hidup mereka. Kriminalisasi tersebut dilakukan melalui tuduhan untuk menjerat masyarakat yang sedang mempertahankan hak-haknya.

Bentuk kriminalisasi korban dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* digambarkan melalui pernyataan tokoh Hotma Cornelius, sebagaimana dapat terlihat dalam kutipan berikut.

“Tapi jangan lupa, klienku juga sama berhak dilindungi dari pihak-pihak anarkis, provokator yang mengancam keselamatan pegawai dan operasional tambang. Baik saat demonstrasi pertama, maupun pecahnya kerusuhan kedua, klienku tidak pernah meminta, menyuruh, apalagi mendalangi pemukulan, penembakan kepada penduduk. Dan klienku percaya seratus persen, aparat penegak hukum, juga tentara yang diperbantukan menjaga keamanan, selalu bertindak mengacu pada SOP dan peraturan yang berlaku...Adalah fakta, penduduk setempat yang menyerang lebih dulu dengan buas. Lantas apa yang harus dilakukan aparat? Pasrah?” (Liye, 2024: 131).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menunjukkan bagaimana masyarakat dalam novel yang melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah. Hal tersebut terlihat dari dialog Hotma Cornelius yang memberikan label negatif kepada masyarakat dengan mengatakan mereka anarkis dan provokator, yang berupaya mempertahankan hak atas lingkungan dan ruang hidup mereka. Palebelan tersebut membentuk kesan bahwa masyarakat merupakan sumber kerusuhan dan ancaman terhadap keamanan dan mengganggu operasional perusahaan.

Sementara itu, praktik kriminalisasi tersebut diperjelas melalui penangkapan tokoh Budi oleh aparat, yang di mana tokoh Budi ini adalah tokoh yang digambarkan sebagai salah satu pihak yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam novel yang terdampak proyek besar bernama *Semesta International Industrial Park* atau SIIP, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut.

...puluhan polisi berdatangan ke rumah, Budi ditangkap. Dengan tuduhan, merusak alat berat, mengganggu proyek nasional, memprovokasi warga, panjang sekali isi surat yang dibawa polisi yang menjemputnya. SIIP memiliki saksi-saksi kejadian, juga rekaman—karena ada sekuriti yang membawa kamera.

Budi termangu.

“Bapak harus segera ikut kami.” Polisi berseru tegas.

Borgol dipasang. Dia seperti penjahat besar, atau buronan koruptor kelas kakap, digelandang, didorong kasar naik ke atas mobil petugas (Liye, 2024: 202-203).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan bagaimana proses hukum digunakan untuk menempatkan Budi sebagai pelaku kejahatan. Berbagai tuduhan dikenakan kepadanya, mulai dari tuduhan merusak alat berat, mengganggu proyek nasional, hingga tuduhan memprovokasi masyarakat lainnya. Dengan demikian, tindakan perlawanan terhadap kebijakan perusahaan diubah menjadi persoalan hukum yang menjadikan pihak yang memperjuangkan kepentingan masyarakat justru menjadi tersangka. Penggambaran penangkapan tokoh Budi yang dilakukan secara represif tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara masyarakat kecil dengan aparat penegak hukum. Pemasangan borgol serta perlakuan yang menggambarkannya seperti pelaku kejahatan besar memperlihatkan bagaimana hukum digunakan untuk memberikan tekanan psikologis sekaligus membangun citra bahwa pihak yang menolak proyek perusahaan merupakan pelanggar hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berargumen bahwa Tere Liye menghadirkan kritik terhadap praktik kriminalisasi yang sering menimpa masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pihak-pihak yang ingin memperjuangkan hak masyarakat kecil sebagaimana sering kali terjadi di Indonesia. Sementara itu, dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, Tere Liye menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan untuk melemahkan perlawanan masyarakat yang berupaya untuk mempertahankan haknya dengan menghalangi pembangunan proyek korporasi besar, dengan menjadikan masyarakat yang melakukan upaya perlawanan tersebut dijadikan tersangka.

e. Kolusi Antar lembaga

Kolusi antar lembaga didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu, dan hanya untuk menguntungkan kelompok mereka sendiri. Praktik tersebut pada umumnya selalu melibatkan hubungan antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, serta pihak korporasi yang saling mendukung demi untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan tidak lagi sepenuhnya bersifat independen dan tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan lebih menguntungkan kelompok yang terlibat dalam lingkaran relasi tersebut.

Bentuk kolusi antar lembaga dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, digambarkan melalui hubungan antara pemilik modal dan elite politik yang berlangsung menjelang pemilihan presiden. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

“Daripada sibuk mengurus satu-dua wawancara, suruh mereka menyumbang lagi, sepuluh kali lebih banyak, agar aku bisa memenangkan pemilihan ini. Kita butuh lebih banyak amplop, sembako dan kumpulan massa. Beri tahu mereka, jika aku kalah, lupakah konsesi itu! Mereka tidak akan mendapat apa pun dari sana” (Liye, 2024: 66).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara pengusaha dan elite politik, Dukungan finansial yang diberikan oleh para

pengusaha tidak semata-mata ditujukan untuk membantu proses politik, melainkan sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pengusaha memberikan dukungan kepada calon presiden, sementara calon presiden menjanjikan keberlanjutan proyek dan pemberian konsesi apabila berhasil memenangkan dalam pemilu tersebut. Sementara itu, Tere Liye juga menggambarkan praktik kolusi antar lembaga dalam novel ditunjukkan melalui dialog elit politik yang menjanjikan sebuah jabatan dan keuntungan ekonomi kepada aparat yang siap membantu menyukseskan kepentingan perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

“Nah, setelah semua dipelajari, Jenderal bisa kembali mengabdikan di ibu kota, posisi menteri akan pas. Tuan Liem juga akan memberikan kepemilikan saham satu-dua perusahaan mitra. Sebagai alasan bantuan Jenderal selama ini” (Liye, 2024: 120).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara aparat negara dan pihak korporasi. Melalui dialog antara tangan kanan perusahaan milik Tuan Liem dengan Mayor Bacok, terlihat adanya janji pemberian jabatan dan keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas bantuan Mayor Bacok yang telah berhasil menjaga kepentingan perusahaan tambang. Bantuan tersebut berupa kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan serta berhak atas kepemilikan saham pada perusahaan mitra yang berpotensi dapat memberikan keuntungan finansial. Melalui penggambaran tersebut, Tere Liye menghadirkan kritik terhadap praktik kolusi yang melibatkan berbagai lembaga dan kelompok berkepentingan. Tere Liye menunjukkan bahwa ketika hubungan antara elite politik, pemilik modal, aparat keamanan dan lembaga negara dibangun atas dasar kepentingan bersama, maka dalam hal ini sebuah kebijakan maupun proses hukum berpotensi tidak akan netral dan kehilangan independensinya.

Selain menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan antara aparat negara dan korporasi, Tere Liye juga menggambarkan bentuk kolusi antarlembaga yang lebih kompleks melalui penyatuan peran antara regulator sekaligus pelaku usaha. Sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut.

“Yang Mulia, adalah fakta jika Saudara Menteri adalah pemilik perusahaan tambang, juga berbagai bisnis lain. Maka, poinnya adalah, dia mewakili kepentingan siapa sebenarnya?”

“Karena di negara ini, sejak lama, telah menjadi praktik lazim regulator merangkap sekaligus pelaku. Dia yang mengatur regulasi usaha tambang misalnya, dia juga yang punya tambangnya. Dia yang mengatur harga minyak goreng, dia yang punya perkebunan kelapa sawit (Liye, 2024: 290).

Berdasarkan kutipan di atas, Tere Liye menggambarkan praktik kolusi antar lembaga melalui rangkap peran seorang pejabat negara yang sekaligus menjadi pelaku usaha. Melalui dialog aktivis lingkungan dalam persidangan, Tere Liye mempertanyakan independensi pejabat yang memiliki kewenangan mengatur suatu sektor, akan tetapi pada saat yang sama juga memperoleh keuntungan dari sektor tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan karena regulator akan sulit bertindak objektif ketika kepentingan bisnis pribadinya pun terlibat. Tere Liye juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kedekatan antara pengusaha dan elite politik yang

memungkinkan terjalinnya hubungan saling menguntungkan demi menjaga keberlanjutan usaha dan berbagai proyek yang sedang berjalan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut.

"...kenapa Anda begitu semangat mendukung capres terpilih?"

Tuan Liem diam sebentar.

"Aku menyukai visi misinya. Mewujudkan negara yang maju. Menurutku bagus."

"Bukankah visi misi capres lain juga mirip, sebelas-duabelas saja? Mewujudkan negara yang maju. Kenapa Anda tidak menyumbang ke capres itu? Atau jangan-jangan karena capres satunya jelas-jelas menolak konsesi proyek Anda dan hendak membatalkannya?"

Tuan Liem menggeleng, "Tidak.... Sebagai pengusaha, kami membutuhkan stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi. Agar bisnis berjalan lancar, tumbuh. Capres yang aku dukung adalah calon dari partai politik pemenang periode sebelumnya. Jadi, dia lebih cocok, melanjutkan pembangunan. Ini tidak ada kaitannya dengan konsesi proyek" (Liye, 2024: 309).

Berdasarkan kutipan di atas, melalui tokoh Tuan Liem Tere Liye memperlihatkan adanya relasi yang erat antara pemilik modal dan elite politik. Dukungan politik yang diberikan pengusaha dikemukakan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga stabilitas negara dan mendukung pembangunan. Akan tetapi, Tere Liye juga menghadirkan kritik bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan ekonomi. Pernyataan Tuan Liem yang menyangkal keterkaitan dukungannya dengan konsesi proyek justru menguatkan dugaan adanya hubungan timbal balik antara dukungan politik dan kepentingan bisnis. Dengan demikian, Tere Liye menunjukkan bahwa relasi antara pengusaha dan penguasa berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang akan menguntungkan kelompok tertentu.

Persoalan tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai perdebatan publik yang terjadi di Indonesia mengenai potensi kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis. Salah satu media daring yang menulis berita tersebut adalah Betahita (2018), memuat tentang laporan yang dikeluarkan oleh *Greenpeace* Indonesia, Auriga, JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), dan ICW mengenai keterkaitan beberapa elite politik dan bisnis batu bara. Dalam informasi tersebut, menyampaikan kekhawatiran terkait konflik kepentingan ketika pejabat publik di Indonesia memiliki hubungan dengan sektor usaha yang berada dalam lingkup yang sedang diawasinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berargumen bahwa melalui novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*, Tere Liye memnghadirkan kritik terhadap praktik kolusi antarlembaga yang sering kali melibatkan pengusaha, elite politik, aparat dan pejabat negara. Sementara itu, melalui penulisan novel ini, Tere Liye mengingatkan bahwa kedekatan antara pengusaha dengan elite politik dapat membuka ruang bagi lahirnya kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, kritik yang dihadirkan Tere Liye dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu, melainkan kepada sistem hubungan antara kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan lembaga negara yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial manipulasi hukum dalam novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* karya Tere Liye direpresentasikan melalui tiga aspek sosiologi sastra, yaitu konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan zaman, dan fungsi sosial sastra. Pada aspek konteks sosial pengarang, latar belakang pendidikan Tere Liye di bidang ekonomi serta pandangan sosial Tere Liye memengaruhi

penggambaran berbagai persoalan dalam novel, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, kebijakan perpajakan, konflik agraria dan aktivitas pertambangan. Pada aspek sastra cerminan zaman, novel merepresentasikan berbagai realitas sosial dan politik yang berkembang di Indonesia, seperti perampasan wilayah masyarakat adat, hubungan antara elite politik dan pemilik modal serta keberlanjutan program pemerintahan. Sementara itu, pada aspek fungsi sosial sastra, Tere Liye menghadirkan kritik sosial terhadap manipulasi hukum melalui lima bentuk utama, yaitu pemelintiran fakta, hukum sebagai alat legitimasi, pengaburan proses hukum, kriminalisasi korban, dan kolusi antarlembaga. Kelima bentuk tersebut menunjukkan bagaimana hukum dalam novel digambarkan sangat rentan dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi. Melalui representasi tersebut, Tere Liye menyampaikan kritik terhadap hubungan antara hukum kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan serta menghambat terwujudnya penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, P. S., Maharani, A. K., Syabilla, I. M., Rahdianti, N. C., Fitriani, S., dan Nugroho, M. P. (2025). Analisis sosiologi sastra pada tokoh Jose Karosta dalam naskah Mastoden dan Burung Kondor karya WS. Rendra. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 10(3), 853-861.
- Andriana, M., dan Manaf, N. A. (2022). Analisis wacana kritis Sara Mills dalam novel berkisar merah karya Ahmad Tohari. *Deiksis*, 14(1), 73-80.
- Aryanti, A. A., Firdaus, A., dan Suparman, F. (2025). Kritik sosial pada drama Panembahan Reso karya WS Rendra (Sebuah Analisis Sosiologi Sastra). *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 9(2), 34-51.
- Betahita. (2018). Dituding terlibat konflik kepentingan di bisnis batubara, ini kata Luhut. *Betahita*. Retrieved 17 Mei 2026 from <https://www.betahita.id/sorot/2754/dituding-terlibat-konflik-kepentingan-di-bisnis-batubara-ini-kata-luhut>
- Dalidjo, N. (2021). Ancaman perampasan wilayah adat dalam UU Cipta Kerja. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)*.
- DDTCNews, R. (2017). Ini curhatan novelis Tere Liye soal tingginya pajak penulis. *DDTC News*. Retrieved 20 Mei 2026 from <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/10871/ini-curhatan-novelis-tere-liye-soal-tingginya-pajak-penulis>
- Dewananda, F. (2023). Dari eksploitasi alam hingga konflik bersenjata, jejak berdarah tambang di Papua. *Indonesiana by Tempo*. Retrieved 25 Mei 2026 from <https://www.indonesiana.id/read/164400/dari-eksploitasi-alam-hingga-konflik-bersenjata-jejak-berdarah-tambang-di-papua>
- Fitrianingrum, E. (2016). Nilai budaya dalam cerita Batu Darah Muning dari Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *JP-BSI*, 1(2), 45-57.
- Harsono, F. H. (2019). Tinggal di lokasi tambang emas, bahaya merkuri intai warga. *Liputan6*. Retrieved 26 Mei 2026 from <https://www.liputan6.com/health/read/4123564/tinggal-di-lokasi-tambang-emasa-bahaya-merkuri-intai-warga>
- Hasmiati, Agussalim, A., dan Aziz. (2025). Ekokritik dan nilai-nilai pendidikan dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye. *AUFKLARUNG: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya* 4(4), 1-9.
- Herwati, S. R. M. (2019). *Kriminalisasi masyarakat adat : ancaman dan usulan kebijakan*. YLBHI.

- Liye, T. (2024). *Teruslah Bodoh Jangan Pintar*. Depok: SABAKGRIP.
- Luthan, S. (2007). Hubungan hukum dan kekuasaan. *Lus Quia Lustum Law Journal*, 14(2).
- Prasetyo, H., Putri, A. S., Salsabila, H. V., dan Zaharani, A. (2025). Representasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye. *J-Symbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 13(1), 356-367.
- Puspasari, H. S., Cahyono, B. E. H., dan Soleh, D. R. (2023). Nilai religius dalam novel Hati Suhita Karya Khilma Anis untuk pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 7(1), 47-55.
- Setiawati, S. (2024). 9 Konglomerat ini bisa cuan besar usai Prabowo sah jadi presiden. *CNBC Indonesia*. Retrieved 27 Mei 2026 from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240423101625-128-532536/9-konglomerat-ini-bisa-cuan-besar-usai-prabowo-sah-jadi-presiden>
- Sinubu, R. J. Z., Sigarlaki, S. J., dan Lotulung, D. R. (2022). Analisis struktural genetik pada Novel Rogue Lawyer karya John Grisham: Analisis sosiologi sastra. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi* 27.
- Waluyo, S. (2014). Kritik sosial terhadap sistem hukum dalam Novel Bukan Karena Kau karya Toha Mohtar: Sebuah tinjauan sosiologis. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 20(2), 9-23.
- Wulandari, I., Zahara, N., Billa, A. S., dan Mustika, D. (2025). Peran guru dalam mendidik anak usia dasar (Studi Kasus: Sekolah Dasar Islam Plus YLPI Pekanbaru). *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(2), 429-438.
- Wulandari, S., Salamah, dan Frandika, E. (2024). Nilai-nilai perjuangan tokoh utama dalam Novel Janji Karya "Tere Liye": Pendekatan sosiologi sastra. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(4), 3890-3897.